

2022

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

Direktorat Pengawasan Infrastruktur,
Tata Ruang, dan Perhubungan



OT.02/LPP-49/D103/2/2022

1 JULI 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85902566

Nomor : OT.02/LPP-49/D103/2/2022 1 Juli 2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan
Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan
Perhubungan Triwulan II Tahun 2022

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Triwulan II Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian *Outcome* Triwulan II Tahun 2022.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terlihat pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian *Outcome* Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Triwulan II Tahun 2022

No	Sastra/ IKU	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	Tw-II	Tw-II	2022	Tw-II	
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah							
1.1	Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	0	0	2.245.641	100,00%	100,00%	
1.2	Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	Rp (Juta)	3.360.752	1.680.376	19.190.905	571,03%	1.142,00%	
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	1.551	0	0	0,00%	0,00%	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional							
2.1	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	PP	3	0	0	0,00%	0,00%	
2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	KP	10	0	0	0,00%	0,00%	
2.3	Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target	PPS	14	0	0	0,00%	0,00%	

No	Sastra/ IKU	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2022	Tw-II	Tw-II	2022	Tw-II
2.4	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	3	3	5	166,67%	166,67%
V Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L							
5.1	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	%	100	0	0	0,00%	0,00%
5.2	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	%	100	75	75	75,00%	75,00%
5.3	Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3	%	50	0	0	0,00%	0,00%

Kinerja Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Pencapaian Sasaran strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi
2. Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien
3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Dari hasil pengukuran kinerja sastra 1, berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2022, secara keseluruhan Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar Rp21.436.548.023.790,40, yang berasal dari optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi sebesar Rp2.245.641.679.186,57 dan nilai efisiensi pengeluaran Negara/ daerah Rp19.190.906.344.603,90.

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja sastra 1 adalah sebagai berikut:

1.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi

Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi adalah nilai optimalisasi penerimaan Negara/ daerah yang dapat direalisasikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Penerimaan Negara/ daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/ APBD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Negara adalah pajak, bea cukai, dan PNBPN, serta sumber penerimaan lainnya, penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan Negara/ daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi diukur dari Nilai koreksi Pajak, Bea, Cukai, PNBPN, dan/atau penerimaan negara lainnya yang kurang bayar dan/atau pengurangan lebih bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan periode tahun berjalan.

Tidak terdapat target atas IKK 1.1 Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi pada Ditwas ITRP, namun sampai dengan triwulan II tahun 2022 terdapat realisasi Rp2.245.641.679.186,57.

Ringkasan Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi Triwulan II Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)	Penjelasan
1	PNBP	2.245.641.679.186,57	Terdapat potensi PNBPN yang hilang pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sekurang-kurangnya sebesar Rp2.245.641.679.186,57
	Jumlah	2.245.641.679.186,57	-

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi pada Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp2.245.641.679.186,57 berasal dari hasil pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dengan uraian sebagai berikut:

1. PNBP berupa Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan oleh Perusahaan Bongkar Muat Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang hilang sekurang-kurangnya sebesar Rp1.316.207.973.679,82;
2. PNBP kontribusi jasa pandu dan tunda di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, hilang sekurang-kurangnya sebesar Rp92.137.333.656,04;
3. PNBP atas fee konsesi jasa kepelabuhanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut hilang sekurang - kurangnya sebesar Rp512.081.337.605,08
4. PNBP fee konsesi dari jasa terkait kepelabuhanan yang hilang sekurang - kurangnya sebesar Rp256.699.186.590,18;
5. PNBP fee konsesi dari perusahaan Pelabuhan yang beroperasi tanpa izin hilang sekurang-kurangnya sebesar Rp52.591.692.689,83;
6. PNBP penggunaan perairan yang lebih besar dari perjanjian hilang sekurang-kurangnya sebesar Rp15.924.154.965,62.

**1.2. Nilai
Pengeluaran
Negara/Daerah yang
Efisien**

Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/ pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Yang dimaksud dengan perencanaan tidak tepat antara lain tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.

Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan/ atau efisien yang direkomendasikan untuk:
 - a) dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih efektif atau lebih hemat;

- b) rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih efektif atau lebih hemat; atau
 - c) ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- 2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, verifikasi tunggakan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dsb
 - 3) Nilai koreksi rencana investasi/rencana biaya operasional pada konsesi, KPBU, pemanfaatan BMN, dsb. berdasarkan laporan hasil pengawasan.

Pada Triwulan II tahun 2022, Nilai pengeluaran Negara yang efisien berdasarkan hasil pengawasan BPKP yaitu sebesar Rp19.190.906.344.603,90, mencapai 571,03% dari target tahun 2022 sebesar Rp3.360.752.000.000,00.

Ringkasan Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Nilai pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien per Triwulan II Tahun 2022

No	Jenis Pengeluaran	Nilai (Rp)	Penjelasan
1	Efisiensi Pengeluaran Lainnya	1.304.794.854.647,86	Koreksi atas Biaya Investasi Perusahaan Jalan Tol Tangerang-Merak
2	Efisiensi Pengeluaran Lainnya	1.815.262.307.447,00	Koreksi atas pencapaian pekerjaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek sampai dengan IPC 18 (Desember 2021)
3	Efisiensi Pengeluaran Lainnya	16.070.849.182.509,00	Koreksi atas Nilai Investasi atas Penyediaan dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan melalui mekanisme penugasan/penunjukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia Maspion
	Jumlah	19.190.906.344.603,86	

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp19.190.906.344.603,86 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien dari Hasil Pengawasan Pengeluaran Negara Lainnya
 - Reviu dalam rangka Evaluasi Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Tangerang-Merak dari nilai sebelum reviu sebesar Rp2.789.285.085.402,56 dan nilai setelah reviu Rp1.484.490.230.754,70 atau terdapat koreksi hasil reviu sebesar Rp1.304.794.854.647,86.
 - Audit Tujuan Tertentu atas Pencapaian Pekerjaan Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek periode sampai dengan Desember 2021 dengan nilai tagihan kumulatif sebelum audit sebesar Rp17.813.688.739.529,30 menjadi sebesar Rp15.998.426.431.082,30 atau terdapat koreksi sebesar Rp1.815.262.307.447,00 akibat penyedia jasa menagihkan volume pekerjaan yang seharusnya belum dapat ditagihkan antara lain karena sifat kontrak pekerjaannya terima jadi (*turnkey*)
 - Reviu dalam rangka Perhitungan Jangka Waktu Konsesi atas Investasi Penyediaan dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan melalui mekanisme penugasan/penunjukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia Maspion dari nilai sebelum reviu sebesar Rp125.583.028.699.019,00 menjadi sebesar Rp109.512.179.516.510,00 atau terdapat koreksi hasil reviu sebesar Rp16.070.849.182.509,00.

1.3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Nilai penyelamatan keuangan negara adalah Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan/atau nilai aset yang dipulihkan berdasarkan hasil pengawasan.

Nilai penyelamatan keuangan negara diukur dengan menjumlahkan Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dan/atau nilai aset yang dipulihkan.

Per Triwulan II tahun 2022, nilai penyelamatan keuangan negara berdasarkan hasil pengawasan BPKP yaitu sebesar Rp0,00,

mencapai 0,00% dari target tahun 2022 sebesar Rp1.551.000.000,00.

Ringkasan nilai penyelamatan keuangan negara disajikan pada table 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan penyelamatan keuangan negara Tahun 2022

No	Jenis Pengawasan	Nilai (Rp)	Penjelasan
	Temuan pengembalian Negara	0,00	-

2

Sasaran Strategis 2: *Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional*

Pencapaian Sasaran strategis 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target
4. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Capaian Indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah program prioritas (PP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah PP yang tercapai target terhadap total jumlah PP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan.

Target kinerja Direktorat untuk kinerja pada tahun 2022 yang sebanyak 3 program prioritas.

Per Triwulan II tahun 2022, program prioritas belum dapat direalisasikan pada Triwulan II Tahun 2022. Ringkasan kinerja per Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut:

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
1	Memperkuat Infrastruktur untuk	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat	Rasio KPR terhadap PDB	3,30%	0,00%	0,00%	

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda ✓
	Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau					
				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Kecukupan Luas Lantai per Kapita	94%	0,00%	0,00%	
				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding)	84,08%	0,00%	0,00%	
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Perumahan	63,20%	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	95,10%	0,00%	0,00%	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	13,45%	0,00%	0,00%		
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	25,57%	0,00%	0,00%		
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,53%	0,00%	0,00%		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07 akses layak (termasuk 11,5 akses aman) %	0,00%	0,00%		

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda ✓
				Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2,98%	0,00%	0,00%	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	75,28 penanganannya, 9,13 pengurangan %	0,00%	0,00%	
				Persentase PDAM dengan kinerja 'sehat	91,80%	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	180 Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	26 menit	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya Optimalisasi Waduk	Volume tampungan air per kapita	53,90 m ³ /kapita	0,00%	0,00%	
			Multiguna dan Modernisasi Irigasi	Persentase luas sawah berrigasi	55,50%	0,00%	0,00%	
				Luas daerah Irigasi premium yang dimodernisasi	568.747 hektar	0,00%	0,00%	
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten /kota	94/72/60%	0,00%	0,00%	
				Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	300 km	0,00%	0,00%	
				Panjang jalan baru yang terbangun	695 km	0,00%	0,00%	
				Kondisi jalur KA sesuai standar Track	0,85	0,00%	0,00%	

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda ✓
				Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2				
				Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	6.396 km	0,00%	0,00%	
				Jumlah Pelabuhan utama yang memenuhi standar	3 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	
				Jumlah Rute Subside Tol Laut	26 rute	0,00%	0,00%	
				Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	19 pelabuhan (10 selesai 9 berlanjut) pelabuhan	0,00%	0,00%	
				Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	14 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	
				Jumlah rute Jembatan udara	42 (berlanjut) rute	0,00%	0,00%	
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kumulatif)(kota)	5 (berlanjut) Lokasi	0,00%	0,00%	
				Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kumulatif) (kota)	5 (berlanjut) kota	0,00%	0,00%	
				Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	6 kawasan	0,00%	0,00%	

Penugasan Pengawasan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

No.	PP	Kegiatan Pengawasan yang telah dilaksanakan
1	Infrastruktur Pelayanan	Survei Pendahuluan dan Penyusunan Draft Pedoman Pengawasan Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, antara lain ;

	Dasar (PN/PP: 05/01)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengawasan Perumahan Rakyat b. Pedoman Pengawasan Infrastruktur SPAM c. Pedoman Pengawasan Infrastruktur SPAL
		Survei pendahuluan dan penyusunan <i>draft</i> pedoman pengawasan atas Program Prioritas peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan.
2	Infrastruktur Ekonomi (PP/PP: 05/02)	<p>Survei Pendahuluan dan Penyusunan Draft Pedoman Pengawasan Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi, antara lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengawasan Pembangunan Bandara b. Pedoman Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan c. Pedoman Pengawasan Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung) d. Pedoman Pengawasan Pembangunan Jalan e. Pedoman Pengawasan Infrastruktur Jalan Tol f. Pedoman Pengawasan Pembangunan Jembatan g. Pedoman Pengawasan Infrastruktur Bendungan dan Jaringan Irigasi h. Pedoman Pengawasan Optimalisasi Program Padat Karya
3	Infrastruktur Perkotaan (PN/PP: 05/03)	Belum terdapat penugasan pengawasan terkait Infrastruktur Perkotaan

Program Prioritas yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

No.	Program Prioritas	Rencana Pelaksanaan
1	Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar	Triwulan IV
2	Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi	Triwulan IV
3	Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan	Triwulan IV

2.2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah kegiatan prioritas (KP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah KP yang tercapai target terhadap total jumlah KP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak 10 kegiatan prioritas.

Per Triwulan II tahun 2022, kegiatan prioritas belum dapat direalisasikan pada Triwulan II tahun 2022. Ringkasan kinerja per Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut:

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Tahun 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman	Jumlah Hunian Baru Layak Huni yang Terbangun melalui peran pemerintah	4.423 Unit	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Tahun 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
		Layak, Aman dan Terjangkau					
			Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan termasuk SMF dan TAPERA	119.000 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	200042 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah Peningkatan Kualitas Hunian melalui Peran Pemerintah	101000 Unit	0,00%	0,00%	
			Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	696 Hektar	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	48 Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang	48 Kabup	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Tahun 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
			mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	aten/Kota			
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	17.288.765 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan		47.011.647 Rumah Tangga	0,00%	0,00%		
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman		9.094.012 Rumah Tangga	0,00%	0,00%		
			Persentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%	0,00%	0,00%	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	62.352 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	284.145 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	1.730.314 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar	4.470.423 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Tahun 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
			sanitary landfill (RT)				
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	316.629 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	308.845 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	87 Kab/Kota	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	83 Kab/Kota	0,00%	0,00%	
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2,98%	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	88,87 m ³ /detik	0,00%	0,00%	
			Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	65%	0,00%	0,00%	
		Keselamatan dan	Rasio kejadian kecelakaan	1,09 Nilai	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Tahun 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda <input checked="" type="checkbox"/>
		Keamanan Transportasi	pelayaran laut per 10.000 pelayaran				
			Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2,15 Nilai	0,00%	0,00%	
			Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	0,25 Nilai	0,00%	0,00%	
			Rasio kejadian kecelakaan pelayaran darat per 10.000 pelayaran	0,09 Nilai	0,00%	0,00%	
		Ketahanan ; Kebencanaan Infrastruktur	Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir	0%	0,00%	0,00%	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut	0%	0,00%	0,00%	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api	0%	0,00%	0,00%	
		Waduk Multipurpose dan Modernisasi Ingasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	16,1 miliar m ³	0,00%	0,00%	
			Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	9 unit	0,00%	0,00%	
			Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan	10 unit	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Tahun 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
			penurunan indeks risiko				
			Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	9 Daerah Irigasi	0,00%	0,00%	
			Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	45.000 hektar	0,00%	0,00%	
2	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan	Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	3 lokasi	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah lokasi jalan dan jembatan pada kawasan prioritas yang dibangun	9 lokasi	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah lokasi Jalan yang dipreservasi	92 lokasi	0,00%	0,00%	✓
		Konektivitas Kereta Api	Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	178,8 (berlanjut) Km	0,00%	0,00%	✓
			Panjang Jalur Kereta Api yang ditingkatkan	123,4 (berlanjut) Km	0,00%	0,00%	✓
		Konektivitas Laut	Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	29 lokasi	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	154 rute	0,00%	0,00%	✓
		Konektivitas Udara	Jumlah rute jembatan udara (rute)	39 Rute	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	29 Lokasi	0,00%	0,00%	✓

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Tahun 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
			Layanan Subsidi Angkutan Udara	1 Tahun	0,00%	0,00%	✓
		Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	44 Lokasi	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal Tipe A yang dibangun	13 Lokasi	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun	4 Unit	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	315 Layanan	0,00%	0,00%	✓
			Jumlah layanan perintis angkutan jalan	330 Layanan	0,00%	0,00%	✓

2.3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah proyek prioritas strategis yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara Jumlah PPS yang tercapai target atas total jumlah PPS yang dilakukan pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak 14 proyek prioritas strategis.

Per Triwulan II tahun 2022, proyek prioritas strategis belum dapat direalisasikan pada Triwulan II tahun 2022. Ringkasan kinerja per Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut:

No	PPS	Indikator sesuai RPJMN/ RKP Th 2022	Target	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
1	Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan (Reforma Agraria) Masyarakat	-	-	-	-	✓
2	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	-	-	-	-	✓
3	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	-	-	-	-	✓
4	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90	-	-	-	-	✓

	Persen Rumah Tangga)					
5	18 Waduk Multiguna	-	-	-	-	√
6	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	-	-	-	-	√
7	Kereta Api Makassar-Pare Pare	-	-	-	-	√
8	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	-	-	-	-	√
9	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	-	-	-	-	√
10	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	-	-	-	-	√
11	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	-	-	-	-	√
12	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	-	-	-	-	√
13	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	-	-	-	-	√

2.4. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara Jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak 3 proyek strategis nasional.

Per Triwulan II tahun 2022, proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target adalah sebanyak 5 PSN atau mencapai 166,67% pada Triwulan II tahun 2022. Pengawasan Proyek Strategis Nasional akan dilaksanakan lebih lanjut pada Triwulan III dan IV Tahun 2022. Ringkasan kinerja per Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut:

No	PSN	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda √
1	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	-	0,00	0,00	0,00	√
2	Pelabuhan Patimban	-	100,00	99,61	99,61	√
3	Kereta Api Jakarta - Surabaya	-	0,00	0,00	0,00	√
4	Rumah Susun	-	68,58	72,10	105,13	√
5	Bantuan Rumah Swadaya	-	97,49	84,27	86,43	√
6	Bendungan Ciawi	-	78,69	80,62	102,45	√

7	Bendungan Sukamahi	-	82,46	82,44	100,00	√
8	Jakarta Sewerage System	-	0,00	0,00	0,00	√
9	Kampus Universitas Islam International Indonesia	-	48,09	84,78	184,29	√
10	Jalan Akses Exit Tol	-	0,00	0,00	0,00	√
11	Program Pengembangan Superhub	-	0,00	0,00	0,00	√
12	Bandara Kediri	-	0,00	0,00	0,00	√
13	Bandara Nabire Baru	-	100,00	84,98	84,98	√
14	Bandara Bali Baru	-	0,00	0,00	0,00	√
15	KA Logistik Lahat - Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang	-	33,33	33,33	33,33	√
16	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	-	0,00	0,00	0,00	√
17	Pemerataan Ekonomi Reforma Agraria	-	-	-	-	√
18	Tanggul Pantai	-	5,37	5,37	100,00	√

5 Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L

Pencapaian Sasaran strategis 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
3. Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3

Capaian Indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.1. Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dari jumlah APIP K/L dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3 dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 100%.

Per Triwulan II tahun 2022, K/L dengan kapabilitas \geq 3 sebanyak 0,00 % (0 APIP K/L dari 4 APIP K/L Mitra), atau mencapai 0,00% dari target tahun 2022 sebesar 100% (4 APIP K/L dari 4 APIP K/L Mitra).

Masih rendahnya capaian disebabkan karena Penilaian Kapabilitas APIP K/L belum dapat direalisasikan di Triwulan II tahun 2022. Penilaian Kapabilitas APIP direncanakan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Rincian level kapabilitas APIP K/L yang sudah mencapai level 3 penuh dapat dilihat pada Lampiran III.

5.2. Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 penuh diukur dari jumlah K/L dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3; dibandingkan dengan jumlah K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 100%.

Per Triwulan II tahun 2022, K/L dengan maturitas SPIP \geq 3 sebesar 75% (3 K/L dari 4 K/L Mitra), atau mencapai 75% % dari target tahun 2022 sebesar 100% (4 K/L dari 4 K/L Mitra).

Masih rendahnya capaian disebabkan karena salah satu K/L yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum mencapai target skor \geq 3 dengan skor 2,336. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target maturitas SPIP \geq Level 3, yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis secara intensif kepada K/L mitra terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan SPIP. Rincian level maturitas SPIP K/L dapat dilihat pada Lampiran III.

5.3. Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3 Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3 diukur dari jumlah K/L yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3 dibandingkan dengan total K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 50%.

Per Triwulan II tahun 2022, K/L dengan MRI \geq 3 sebesar 0,00% (0 K/L dari 4 K/L Mitra), atau mencapai 0,00% dari target tahun 2022 sebesar 76% (3 K/L dari 4 K/L Mitra).

Masih rendahnya capaian disebabkan tidak ada K/L yang memperoleh nilai MRI \geq 3, antara lain disebabkan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 belum dilakukan evaluasi Level MRI oleh Direktorat pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan pada 4 K/L mitranya.

Rincian level maturitas MRI K/L dapat dilihat pada Lampiran III.

B. Kinerja Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2022

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, pelaksanaan APP yang telah dilaksanakan oleh Ditwas ITRP antara lain Optimalisasi Pemanfaatan KPBU, Tata Kelola

Pendapatan Negara, Kemudahan Perizinan (OSS) dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan KPBU

a. Kecukupan Kualitas Kebijakan dan Tata Kelola

- 1) Terdapat redundansi proses, misalnya adanya proses reviu/evaluasi di masing-masing tahapan KPBU oleh unit yang berbeda dengan obyek reviu/evaluasi yang beririsan;
- 2) Pelaksanaan kerja sama terikat dengan dua regulasi sehingga harus dibuatkan dua perjanjian kerja sama
- 3) Belum ada penjelasan terkait pelaksanaan perjanjian/operasi pada peraturan turunan di Kementerian Perhubungan

b. Rekomendasi

- 1) Mengusulkan perubahan atau amandemen atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2018 untuk menyesuaikan perubahan regulasi KPBU saat ini (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020) terkait proses tahapan KPBU pada Peraturan Menteri Perhubungan tersebut hingga tahapan pelaksanaan (operasi).
- 2) Meningkatkan kualitas pemilihan (transaksi) untuk mendapatkan BUP yang lebih berkualitas dan handal, sehingga permasalahan kegagalan *financial close* dapat diminimalisir.

2. Tata Kelola Pendapatan Negara

Sesuai dengan Surat Kepala BPKP kepada Menteri Perhubungan Nomor SR-343/K/D1/2022 tanggal 22 April 2022 dan Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 11 (sebelas) Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dan 2021 Nomor LR-295/D103/2/2021 Tanggal 30 Desember 2021 telah disampaikan permasalahan strategis dalam pengelolaan PNBPN pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain:

- a. Kebijakan perhitungan besarnya fee konsesi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (HK.103/4/16/DJPL-18 Tahun 2018) belum sesuai dengan Kebijakan Menteri Perhubungan (PM 15 Tahun 2015

dan PM 48 Tahun 2021) sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PNBPN sekarang-kurangnya Rp512.081.337.605,08.

- b. belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai perusahaan jasa terkait kepelabuhanan yang dilakukan oleh BUP di area konsesi yang mengakibatkan PNBPN menjadi tidak optimal sehingga berpotensi hilangnya PNBPN sebesar Rp256.699.186.590,18.
- c. masih lemahnya komitmen dan kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi PNBPN sebesar Rp1.476.861.154.991,32.

3. Kemudahan Perizinan (OSS)

Pada triwulan II 2022, Ditwas ITRP merupakan kontributor atas APP OSS kepada PJ Ditwas Bidang Ekonomi dan Keuangan dan telah melakukan Evaluasi atas Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) pada Kementerian PUPR, Kementerian ATR, dan Kementerian Perhubungan dengan hasil antara lain sebagai berikut:

- a. masih terdapat kelemahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh K/L sebagai kebijakan turunan/teknis dari PP 5 Tahun 2021
- b. masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan PP 5 tahun 2021, antara lain berupa ketidaksesuaian nomenklatur, ketidaksesuaian KBLI pengampu, ketidaktercapaian SLA, dan kendala implementasi aplikasi OSS-RBA
- c. tatakelola OSS untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha sudah cukup memadai, antara lain berupa pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada stakeholders, adanya pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha, dan penyediaan layanan bantuan/help desk/contact center pengaduan
- d. belum seluruh K/L menerima PNBPN atas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan kepada stakeholders
- e. K/L telah mengembangkan aplikasi yang sebagian telah terintegrasi dengan aplikasi OSS-RBA dan sebagian lainnya berstatus hak akses

C. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan II Tahun 2022

Realisasi *output* Pengawasan BPKP sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebanyak 6 Laporan mencapai 75,00% dari target tahun 2022 sebesar 8 Laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan BPKP Triwulan II Tahun 2022 pada Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022*	Realisasi Tw. II 2022	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara	3	3	100,00%
2	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	3	3	100,00%
3	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	2	0	0,00%
4	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	-	-	-
Total		8	6	75,00%

*sesuai target pada RKA

Sumber: SIMA dan e-Sakip (selaraskan angka ini di kedua aplikasi)

Penjelasan tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

1. IKK dengan capaian paling tinggi diperoleh dari IKK "Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan" dan "Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara" yaitu sebesar 6 dari 6 laporan atau sebesar 100,00%.
2. Capaian kinerja yang masih sangat rendah ditunjukkan oleh IKK "Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L" karena belum dapat direalisasikan di Triwulan II tahun 2022.

Rincian output pengawasan dapat dilihat pada Lampiran II.

D. Kendala Pencapaian Target

Pada Triwulan II tahun 2022, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian target kinerja pada Ditwas Bidang ITRP.

E. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar Rp, 881,871,450,00 atau 81,28% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.085.034.000,00 dengan ringkasan sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Tahun 2022 Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw. II 2022 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	-	-	-

Program 06 (Pengawasan Intern)	1.085.034.000	881,871,450	81,28%
Jumlah	1.085.034.000	881,871,450	81,28%

Sumber data: Aplikasi SPAN dan Sikadesk

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Direktur
bppk
 DIREKTORAT
 Syarif Fidi Herwati
 REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I

**CAPAIAN *OUTCOME* TRIWULAN II TAHUN 2022
PADA DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

NO	INDIKATOR KINERJA	D1.3	
		Target	Realisasi
1	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara (dlm juta rupiah)	3.360.752	1.305
2	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara (dlm juta rupiah)	1.551	-
3	Jumlah PP yang Tercapai Sesuai Target	3	-
4	Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target	10	-
5	Jumlah PPS yang Tercapai Sesuai Target	14	-
6	Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target	3	-
7	Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	100%	0%
8	Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	100%	75%
9	Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3	50%	0%

Keterangan:*BT = Belum ditargetkan**BU = Belum diukur**BTD = Belum tersedia data*

Rincian pencapaian target PP tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	PN	PP	Sasaran PP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
1	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Penguasaan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Rasio KPR terhadap PDB Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Kecukupan Luas Lantai per Kapita Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Perumahan Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan Persentase PDAM dengan kinerja 'sehat' Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	3,30% 94% 84,08% 63,20% 95,10% 13,45% 25,57% 69,53% 82,07 akses layak (termasuk 11,5 akses aman) % 2,98% 75,28 penanganan, 9,13 pengurangan % 91,80% 180 Kabupaten/Kota	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022 RKP 2022	
			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	26 menit	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	Volume tampungan air per kapita	53,90 m ³ /kapita	0,00%	0,00%	RKP 2022	

Rincian pencapaian target PP tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	PN	PP	Sasaran PP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
2	Infrastruktur Ekonomi		Optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase luas sawah berrigasi	55,50%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Luas daerah Ingasi premium yang dimodernisasi	568.747 hektar	0,00%	0,00%	RKP 2022	
3	Infrastruktur Perkotaan		Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten /kota	94/72/60%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	300 km	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Panjang jalan baru yang terbangun	695 km	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2	0,85	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	6.396 km	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah Pelabuhan utama yang memenuhi standar	3 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah Rute Subside Tol Laut	26 rute	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	19 pelabuhan (10 selesai 9 berlanjut) pelabuhan	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	14 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah rute Jembatan udara	42 (berlanjut) rute	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kumulatif)(kota)	5 (berlanjut) Lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kumulatif) (kota)	5 (berlanjut) kota	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui permajajaan kota	6 kawasan	0,00%	0,00%	RKP 2022	

Rincian pencapaian target KP tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator	
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Jumlah Hunian Baru Layak Huni yang Terbangun melalui peran	4.423 Unit	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan termasuk SMF dan TAPERA	119.000 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	200 042 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah Peningkatan Kualitas Hunian melalui Peran Pemerintah	101 000 Unit	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	696 Hektar	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	48 Kabupaten/Kot a	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	48 Kabupaten/Kot a	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	17.288.765 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan	47.011.647 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	9 094.012 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat		91,80%	0,00%	0,00%	RKP 2022		
		Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala		62.352 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	RKP 2022		
		Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala		284.145 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	RKP 2022		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)		1.730.314 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)		4.470 423 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)		316.629 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)		308.845 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022		

Rincian pencapaian target KP tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	87 Kab/Kota	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	83 Kab/Kota	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2,98%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	88,87 m3/detik	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	65%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	1,09 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2,15 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	0,25 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Rasio kejadian kecelakaan pelayaran darat per 10.000 pelayaran	0,09 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Ketahanan ; Kebencanaan Infrastruktur	Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir	0%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut	0%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api	0%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	16,1 miliar m3	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	9 unit	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	10 unit	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	9 Daerah Irigasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	45.000 hektar	0,00%	0,00%	RKP 2022	
2	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan	Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	3 lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah lokasi jalan dan jembatan pada kawasan prioritas yang dibangun	9 lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	

Rincian pencapaian target PPS tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2022	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
1	Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan (Reforma Agraria) Masyarakat	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
2	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
3	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
4	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
5	18 Waduk Multiguna	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
6	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
7	Kereta Api Makassar-Pare Pare	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
8	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
9	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
10	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
11	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
12	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
13	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	

Rincian pencapaian target PSN tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PSN	Indikator	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
1	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
2	Pelabuhan Patimban	-	100,00	99,61	99,61	Permenko 7 Tahun 2021	
3	Kereta Api Jakarta - Surabaya	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
4	Rumah Susun	-	68,58	72,10	105,13	Permenko 7 Tahun 2021	
5	Bantuan Rumah Swadaya	-	97,49	84,27	86,43	Permenko 7 Tahun 2021	
6	Bendungan Ciawi	-	78,69	80,62	102,45	Permenko 7 Tahun 2021	
7	Bendungan Sukamahi	-	82,46	82,44	100,00	Permenko 7 Tahun 2021	
8	Jakarta Sewerage System	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
9	Kampus Universitas Islam International Indonesia	-	48,09	84,78	184,29	Permenko 7 Tahun 2021	
10	Jalan Akses Exit Tol	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
11	Program Pengembangan Superhub	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
12	Bandara Kediri	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
13	Bandara Nabire Baru	-	100,00	84,98	84,98	Permenko 7 Tahun 2021	
14	Bandara Bali Baru	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
15	KA Logistik Lahat - Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang	-	33,33	33,33	33,33	Permenko 7 Tahun 2021	
16	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
17	Pemerataan Ekonomi Reforma Agraria	-	-	-	-	Permenko 7 Tahun 2021	
18	Tanggul Pantai	-	5,37	5,37	100,00	Permenko 7 Tahun 2021	

Target dan Progres Pencapaian PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	PP yang ditargetkan	Tercapai	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak

Target dan Progres Pencapaian KP sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	KP yang ditargetkan	Tercapai	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak

Target dan Progres Pencapaian PPS sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	PPS yang ditargetkan	Tercapai	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak

Target dan Progres Pencapaian PSN sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	PSN yang ditargetkan	Tercapai	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak

RINCIAN KINERJA OUTPUT PENGAWASAN S.D. 30 JUNI 2022

Kode Unit Kerja	Unit Kerja	Nama Output	Target	Realisasi	Capaian Output
D1.3	Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara	3	3	100,00%
		Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	3	3	100,00%
		Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	2	0	0,00%
		Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	0	0	
		Sub Jumlah	8	6	75,00%

Lampiran III

RINCIAN LEVEL KAPABILITAS APIP, LEVEL MATURITAS SPIP, INDEKS MANAJEMEN RISIKO K/L MITRA

No.	Ditwas	Nama K/L	SPIP		APIP		MR		
			Skor	Level	Predikat	Level	Predikat	Level	Predikat
13	D1.3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3,052	3	Terdefinisi	3 DC	Infrastructure	4,17	
14	D1.3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2,336	2	Berkembang	3 DC	Infrastructure	1,50	
15	D1.3	Kementerian Perhubungan	3,085	3	Terdefinisi	3 DC	Infrastructure	1,85	
16	D1.3	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,227	3	Terdefinisi	3 DC	Infrastructure	3,04	

Ket: Level 3 yaitu level 3 penuh, tidak termasuk level 3 dengan catatan (DC)



DEPUTI PIP BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
Direktorat Pengawasan Infrastruktur,
Tata Ruang, dan Perhubungan